

**ANALISIS DETEKSI ILUSI FISKAL PEMERINTAH
PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2016-2020**



Skripsi Oleh:

HABIB FIRDA PRATAMA

01021281722090

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS DETEKSI ILUSI FISKAL PEMERINTAH
PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Disusun Oleh

Nama : Habib Firda Pratama
NIM : 01021281722090
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

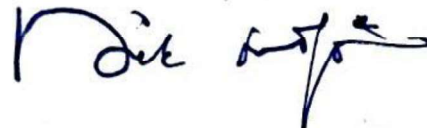
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal : 18 Juli 2022

Tanggal : 7 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING



Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003



Anggota : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS DETEKSI ILUSI FISKAL PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Disusun oleh

Nama : Habib Firda Pratama
Nim : 01021281722090
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

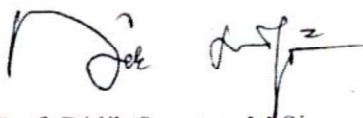
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Rabu, 03 Agustus 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 27 Agustus 2022

Ketua

Anggota

Anggota



Prof. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN
6-9-2022
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Firda Pratama
NIM : 01021281722090
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Stabilitas Jangka Panjang Permintaan Uang dan Kebijakan Moneter di Indonesia

Pembimbing:

Ketua : Prof. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 03 Agustus 2022

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 06 September 2022

Pembuat Pernyataan,



(Habib Firda Pratama)

Nim.01021181823030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagaimana mestinya. Skripsi ini berjudul **Analisis Deteksi Ilusi Fiskal Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2016-2020**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Deteksi Ilusi Fiskal Provinsi di Indonesia dengan melihat hubungan variable Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan penulis sendiri, sebagai bahan refrensi dalam penelitian berkelanjutan, serta bagi pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat secara efektif dan efisien, guna untuk pembangunan daerah masing-masing.

Akhir kata, terimakasih atas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga berbagai kendala dapat teratasi. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap semoga penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

Indralaya, 06 September 2022



(Habib Firda Pratama)
NIM. 01021281722090

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta meridhoi setiap langkah yang penulis lakukan, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak & Ibu selaku orang tua penulis dan Adik yang tak henti memberikan penuh kasih sayang, doa, dan dukungannya baik secara moril maupun materil kepada penulis dari mulai sejak lahir hingga beranjak dewasa dan menempuh perkuliahan ini sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu, Ayah, dan Bibi yang memberikan doa, semangat, motivasi, doa, dukungannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya.
4. Kepada Keluarga Besar baik dari pihak Bapak atau Ibu, terimakasih atas semangat, support, dan doanya selama perkuliahan hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bapak Dr. Muklis, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan dan bapak Dr. Sukanto, S.E, M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan.

6. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, S.E, M.Si dan Ibu Dr. Siti Rohima, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, wawasan, dan segala bentuk arahan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Ibu Feny Marissa, S.E.,M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Mardalena, S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan saran-saran kepada penulis.
9. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya beserta staf pegawai dan karyawan/ti di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama ini.
10. Kepada teman Kos; Indra, Nur, Joko, Heri, Kun, Fajar, Redi, dan Brian terimakasih atas support yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan Ekonomi Pembangunan atas kebersamaan dan pengalaman selama perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Indralaya, 06 September 2022



(Habib Firda Pratama)
NIM. 01021281722090

ABSTRAK

ANALISIS DETEKSI ILUSI FISKAL PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Oleh:

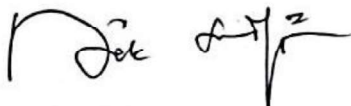
Habib Firda Pratama; Didik Susetyo; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya ilusi fiskal pada bidang keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data panel pada 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan periode 2016-2020. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linier berganda data panel dengan pendekatan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian ini dengan melalui pendekatan pengukuran pendapatan (*revenue enchancement*) menunjukkan adanya ilusi fiskal pasca pemberlakuan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hubungan negatif antara variabel independen (penerimaan) terhadap variabel dependen (pengeluaran). Terdapatnya ilusi fiskal pada bidang keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia, disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan variabel produk domestik regional bruto, pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap variabel belanja daerah. Selanjutnya secara parsial terdapat variabel produk domestik regional bruto yang berpengaruh negatif secara signifikan dan pajak daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah.

Kata kunci: Ilusi Fiskal, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Penerimaan Daerah

Ketua

Anggota



Prof. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

ANALYSIS OF FISCAL ILLUSION DETECTION PROVINCE GOVERNMENT IN INDONESIA 2016-2020 PERIOD

By:

Habib Firda Pratama; Didik Susetyo; Siti Rohima

This study aims to analyze the occurrence of fiscal illusions in the financial sector of the provincial government in Indonesia. The Data used in this study is panel data on 34 provinces in Indonesia with the period 2016-2020. In this study used multiple linear regression analysis techniques panel data with fixed effect model (FEM) approach. The results of this study through the approach of income measurement (revenue *enhancement*) shows the existence of fiscal illusion after the enactment of regional autonomy. This can be seen by the negative relationship between the independent variable (revenue) to the dependent variable (expenditure). There is a fiscal illusion in the financial sector of the provincial government in Indonesia, due to the high dependence of the central government transfer area. The estimation results show that simultaneously the variables of Gross regional Domestic Product, local taxes, General Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund affect the variables of regional expenditure. Furthermore, there are partially variables of gross regional domestic product that have a significant negative effect and local taxes that have a positive and significant effect on regional expenditure variables.

Keywords: Fiscal Illusion, Balance Fund, Regional Expenditure, Regional Revenue, and Panel Data

Head

Member



Prof. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Acknowledged,
Head of Economics Development Departement



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Habib Firda Pratama
	NIM	01021281722090
	Tempat/Tanggal Lahir	Karang Endah Selatan, 26 Oktober 1999
	Alamat	Desa Karang Endah Selatan, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, 31171
	Nomor HP	082185448466
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Laki-laki	
Tinggi Badan	174 cm	
Berat Badan	52 Kg	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Email	habibfirdapratama@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2005-2011	SD Negeri 1 Karang Endah	
2011-2014	SMP Negeri 2 Gelumbang	
2014-2017	SMA Negeri 1 Gelumbang	
2017-2022	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2018-2019	Wakil Ketua Umum IKAMAGEL	
2019-2020	Staff Ahli Dinas Porakrema BEM KM FE UNSRI	
2019-2020	Kepala Departemen PPSDM KMNU UNSRI	
2020-2021	Ketua Divisi Kerohanian dan Sosling IMEPA FE UNSRI	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.2 Tujuan Penelitian	8
1.3 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	10
2.2 Definisi dan Konsep.....	18
2.2.1 Ilusi Fiskal.....	18

2.2.2 Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	24
2.2.3 Penerimaan Pemerintah (Penerimaan Negara).....	26
2.2.4 Belanja Daerah.....	31
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	32
2.2.6 Dana Transfer Daerah (Perimbangan)	33
2.3 Penelitian Terdahulu	34
2.4 Kerangka Pemikiran.....	41
2.5 Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.3 Teknik Analisis	45
3.3.1 Alat Analisis Model	45
3.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	47
3.3.3 Model Regresi Data Panel.....	48
3.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	49
3.5 Metode Pengujian Hipotesis	51
3.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serempak (Uji F)	51
3.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t).....	51
3.5.3 Koefisien Determinasi R^2	51
3.6 Analisis Deteksi Ilusi Fiskal.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	60
4.2.1 Perkembangan Belanja Daerah	60

4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	63
4.2.3 Perkembangan Pajak Daerah.....	67
4.2.3 Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU).....	70
4.2.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH)	73
4.3 Hasil Penelitian	76
4.3.1 Model Regresi Data Panel.....	76
4.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	78
4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik	80
4.3.4 Pengujian Hipotesis.....	82
4.4 Pembahasan.....	85
4.4.1 Nilai Intersep Individu	85
4.4.2 Hubungan PDRB, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Basil terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia	87
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ketentuan Deteksi Ilusi Fiskal Pendekatan Pendapatan	53
Tabel 4.1 Daftar Provinsi di Pulau Sumatera	55
Tabel 4.2 Daftar Provinsi Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	59
Tabel 4.3 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi di Indonesia	61
Tabel 4.4 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia	64
Tabel 4.5 Perkembangan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia	68
Tabel 4.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi di Indonesia	71
Tabel 4.7 Perkembangan Dana Bagi Hasil Provinsi di Indonesia	74
Tabel 4.8 Hasil Estimasi CEM, FEM, dan REM	76
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow	78
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman	79
Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas	81
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.13 Uji t (Variabel Dependen = BD)	84
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi	84
Tabel 4.15 Nilai Intersep Individu (Provinsi)	86
Tabel 4.16 Deteksi Ilusi Fiskal (Signifikansi pada $\alpha = 5\%$)	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Anggaran DBH di Indonesia tahun 2015-2020.....	3
Gambar 1.2 Perkembangan Anggaran DAU di Indonesia tahun 2015-2020.....	4
Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah tahun 2010-2020 di Indonesia	5
Gambar 2.1 Skema Gambar Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Daftar Provinsi di Pulau Jawa.....	56
Gambar 4.2 Daftar Provinsi di Pulau Sulawesi.....	57
Gambar 4.3 Daftar Provinsi di Pulau Kalimantan	58
Gambar 4.4 Hasil Regresi Menggunakan Uji Normalitas.....	80
Gambar 4.5 Uji Autokorelasi	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data dalam Regresi.....	105
Lampiran 2 Hasil Regresi Menggunakan Common Effect Model (CEM)	109
Lampiran 3 Hasil Regresi Menggunakan Fixed Effect Model (FEM)	110
Lampiran 4 Hasil Regresi Menggunakan Random Effect Model (REM).....	111
Lampiran 5 Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow	112
Lampiran 6 Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman	113
Lampiran 7 Hasil Regresi Menggunakan Uji Normalitas.....	114
Lampiran 8 Hasil Regresi Menggunakan Uji Heteroskedastisitas.....	114
Lampiran 9 Hasil Regresi Menggunakan Uji Multikolinieritas.....	115
Lampiran 10 Hasil Regresi Intersep Individu	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu daerah otonomi keuangan daerah saat ini sangatlah penting, utamanya di dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan daerah otonom yang berhasil dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya (Halim, 2001). Artinya suatu daerah harus menguatkan kemampuan keuangan daerahnya guna mengeksplorasi sumber daya keuangan yang tersedia. Lalu menggunakan serta mengelola keuangan daerah sendiri untuk menyelesaikan kegiatan yang ada di pemerintahan, termasuk kegiatan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah daerah harus menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber anggaran dana utama serta meminimalkan ketergantungan pada dana transfer yang diberikan pemerintah pusat.

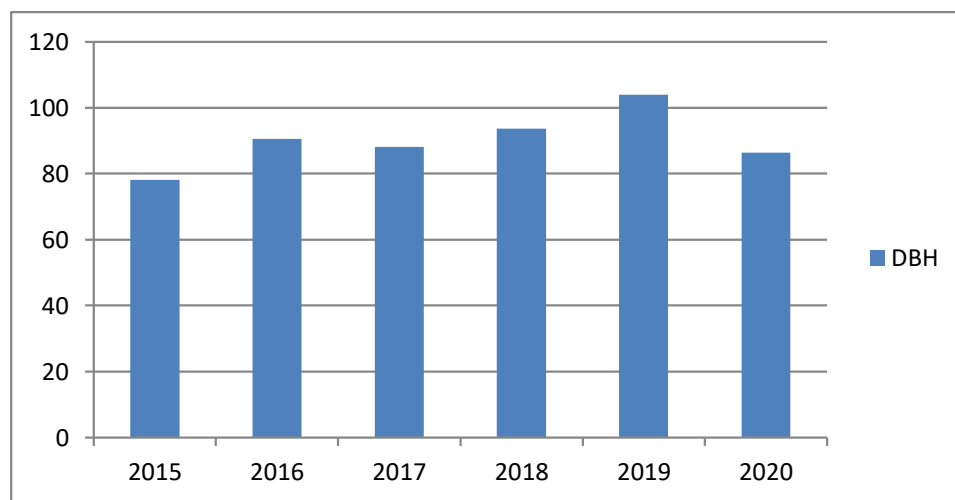
Kemandirian fiskal diperlukan untuk melaksanakan otonomi daerah. Keberadaan daerah yang tidak dapat mandiri secara finansial menggambarkan bahwa daerah tersebut belum bisa melaksanakan otonomi. Otonomi daerah dengan fiskal yang rendah dapat disebabkan oleh minimnya kemampuan sumber daya yang terlihat melalui indeks kapasitas fiskal (IKF) guna menghasilkan pendapatan daerah. Daerah yang kapasitas fiskalnya rendah akan mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk anggaran belanja daerah seperti Dana Alokasi Umum yang lebih besar, namun keadaan ini dapat mengakibatkan daerah menjadi sangat tergantung pada dana perimbangan/transfer dari pusat (Halim, 2001).

Tujuan dari transfer pemerintah pusat selain untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal, juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antar pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan daya yang ada pada masing-masing daerah. Ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) merupakan perbedaan kapasitas /potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sedangkan ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) menunjukkan perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini dicapai dengan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Sari, Susetyo, & Syirod, 2016). Kesenjangan fiskal sangat dipengaruhi oleh alokasi pendapatan sumber daya alam. Persentase bagi hasil sumber daya alam memberikan penghasilan yang cukup signifikan bagi penerimaan pemerintah daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagikan ke daerah, makin meningkat pula kesempatan melaksanakan pembangunan di daerah, namun kemajuan yang dicapai tidak akan pernah menciptakan kesamaan tingkat kemajuan dan kesejahteraan antar daerah. Dikarenakan daerah yang tertinggal dan miskin tidak mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah lebih dahulu maju. Apabila formulasi DAU dengan kebijakan historis itu diteruskan, dalam jangka panjang yang akan terjadi adalah kesenjangan yang makin meluas

antara kota atau kabupaten (desa), serta antara daerah maju dan tertinggal (Sari, Susetyo, & Syirod, 2016).

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi besar kepada anggaran penerimaan. Di bawah ini disajikan tabel data perkembangan dana perimbangan menurut Provinsi di Indonesia.

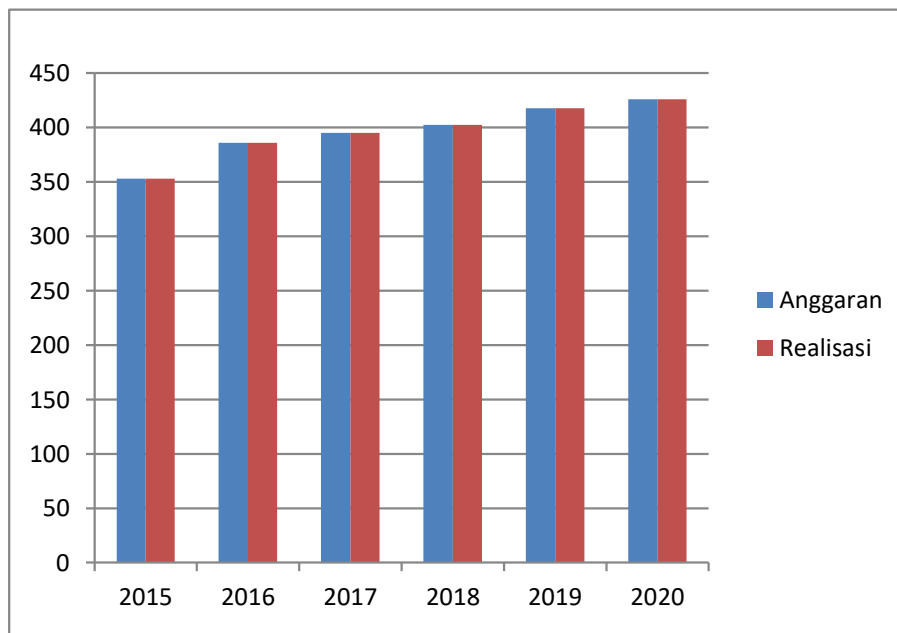


Sumber : Kemenkeu, 2020 diolah

Gambar 1.1 Perkembangan Postur Anggaran DBH di Indonesia tahun 2015-2020 (dalam Triliyun Rupiah)

Tren Dana Bagi Hasil (DBH) di Indonesia 2015-2020 cenderung pertumbuhan rata-rata 2,76 persen per tahun. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh penerimaan negara Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Peningkatan PPh Orang Pribadi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi) dan peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Penurunan sempat terjadi di tahun 2017 dipicu oleh turunnya harga komoditi batu bara. Di samping itu, penurunan PNBPN migas terjadi sebagai dampak turunnya harga minyak (ICP). Pertumbuhan DBH Migas mulai positif pada tahun 2018 seiring dengan membaiknya harga komoditi.



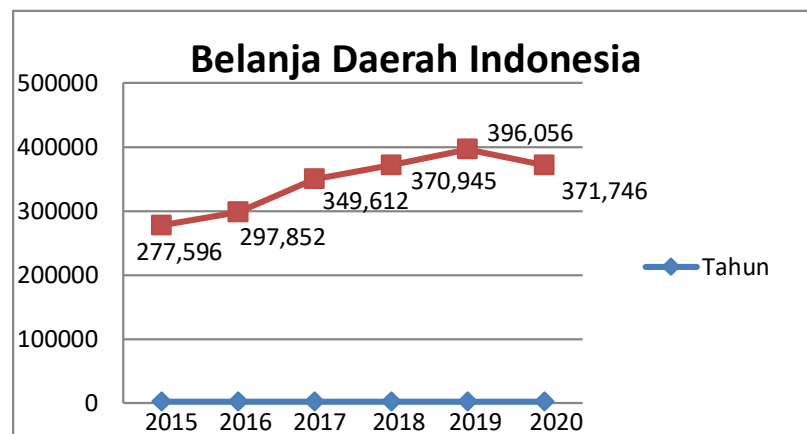
Sumber : Kemenkeu, 2020 diolah

Gambar 1.2 Perkembangan Postur Anggaran DAU di Indonesia tahun 2015-2020 (dalam Triliyun Rupiah)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia 2015-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 persen, yaitu dari Rp352.887,8 miliar (2015) menjadi Rp426.796,2 miliar (*outlook* APBN 2020). Hal ini sejalan dengan peningkatan Pendapatan dalam Negeri (PDN) neto dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto yang menyebabkan alokasi DAU selalu meningkat setiap tahun dalam periode tahun 2015-2020. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat dipengaruhi oleh seberapa besar Penerimaan Dalam Negeri, khususnya DAU yang berasal dari PDN neto minimal

26 persen. Namun pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN 2019 dan 2020 berubah dari yang semula bersifat dinamis menjadi bersifat final demi memberikan kepastian penerimaan daerah dalam pengelolaan APBD.

Tingginya ketergantungan keuangan daerah di pusat dan provinsi juga menekan provinsi untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyaluran dana perimbangan yang diterima daerah secara optimal ke belanja daerah dapat menaikkan pendapatan asli daerah. Fakta menggambarkan bahwa daerah cenderung mengabaikan penggunaan dana perimbangan untuk pengganti dan menarik PAD sebagai basis utama pendapatan daerah.



Sumber: (BPS, 2020)

Gambar 1.3 Realisasi Belanja Daerah tahun 2010-2020 di Indonesia (dalam Miliar Rupiah)

Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara nominal. Tetapi pengeluaran mengalami trend yang fluktuatif walaupun jumlah nominalnya meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aji, 2007) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah

daerah justru semakin menggantungkan pada DAU daripada mengupayakan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Adi, 2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil. Kondisi ini sejalan dengan pandangan para pakar ekonomi. Dominannya peran dana transfer terhadap pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya tidak efektif dalam memberikan bantuan bagi pemerintah daerah terhadap aliran transfer itu sendiri (Kuncoro, 2006).

Adi (2009) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) ke daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa belanja pemerintah daerah merespon perubahan transfer secara asimetris. Perilaku asimetris ini terlihat dengan adanya belanja yang bersumber dari hibah yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, sedangkan di sisi lain anggaran juga berkurang.

Adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD. Besar kecilnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, namun proporsi PAD yang besar tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah terutama DAU sangat dominan dalam pembiayaan belanja daerah (Maimunah, 2006)

Menurut Dollery dan Worthington (dalam Adi, 2009) fenomena seperti ini dapat diindikasikan sebagai ilusi fiskal. Tiap pendapatan pemerintah pasti berdampak pada besarnya sisi belanja. Semakin besar belanja pemerintah, pemerintah pasti mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendapatan pemerintah di masa mendatang, seperti peningkatan pajak publik. Ini membuktikan adanya hubungan simetris pada sisi belanja pemerintah dengan sisi penerimaan pemerintah. Jika ada keadaan sebaliknya dimana ada hubungan asimetris, hal ini bisa dikatakan sebagai ilusi fiskal, karena pemerintah pusat atau masyarakat tidak menyadari bahwa kontribusi (baik dana transfer dan pajak/retribusi daerah) lebih besar dari pada kebutuhan nyata pemerintah daerah. Pemerintah daerah cenderung menggunakan dana hibah dari pemerintah pusat yang secara asimetris berdampak negatif pada upaya peningkatan potensi daerah. Salah satu indikatornya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini mengkaji tentang pendeteksian ilusi fiskal pada keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Bahan kajian provinsi tersebut dimaksudkan guna memulihkan penganggaran dalam memenuhi belanja yang selama ini dilaksanakan daerah. Diduga pemerintah daerah provinsi memiliki perilaku asimetris dalam menyikapi belanja anggaran pemerintah pusat. Perilaku asimetris pemerintah daerah provinsi menjadikan kontribusi pajak daerah dan mempengaruhi pola belanja daerah terhadap kinerja keuangan yang lemah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka untuk penyusunan skripsi ini dipilih judul “Analisis Deteksi Ilusi Fiskal Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2016-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah penelitian yakni, apakah terjadi ilusi fiskal dalam bidang keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya ilusi fiskal dalam bidang keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu bagi akademisi dan bagi praktisi, yakni :

1. Bagi Akademisi
 - a. Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wujud sumbangsih pemikiran bagi jurusan Ekonomi Pembangunan tentang dana transfer daerah serta bahan studi bagi kepentingan penulisan ilmiah yang sejenis.
 - b. Menjadi dasar dan referensi yang relevan untuk penelitian lebih lanjut terkait keuangan daerah.
2. Bagi Praktisi
 - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau dinas-dinas yang terkait untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah.

- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di tingkat Provinsi se-Indonesia sehingga dapat dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Membantu merumuskan kebijakan terkait dengan pemerintah pusat untuk transfer dana ke pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2007). Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.” The 1st National Accounting Conference. *Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Adi, P. H. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Akutansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Aji, W. setia & A. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Universitas Hasanudin, Makassar*.
- Ajija, & R., S. (2012). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprianti, Y. (2020). Deteksi Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah *Detection Of Fiscal Illusions In Local Government Budget Performance In Central*, 22(1), 114–122.
- Aramana, D. (2011). Pengaruh Pendapadatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel moderating pada Provinsi Sumatera Utara. *Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Bhakti, A. (2013). Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan), *1*(2), 71–80.
- Christian, Y., & Yuliana, L. (2016). Deteksi Ilusi Fiskal pada Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013, *3*.
- DJPK. (2020). Dana Perimbangan. Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id
- DJPK. (2022). *Modul Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan*

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Hastuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016, *9*(1), 119–130.

Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, *14*(1).

Gujarati. (2003). *Basic Econometric*. New York.

Halim, A. (2001). *Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Pert). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Handayani, A. (2009). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang*.

Kuncoro, H. (2007). Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Pengaruh Transfer pada Kinerja Keuangan Sektor Publik.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.

Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Paper Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.

- Marpaung, J. D. D. (2018). Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang Tahun 2012-2016).
- Mulya, R., & Bustamam. (2016). Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014), *1*(2).
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur
The Impact of Central Government Transfers on Local Expenditure Behaviour in East Kalimantan Province *Pendahuluan, 1*(2)(1).
- Prasedyawati, L. G. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang tahun 1990-2011.
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik.
- Pratami, P. N. I., & Dwirandra. (2017). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, dan PDRB pada Belanja Daerah serta Deteksi Ilusi Fiskal, *18*.
- Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, PDRB terhadap Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia. *Ekonomi Pembangunan Unud, 10*(3), 4717–4744.
- Rusydi, B. U. (2010). Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008).
- Rusydi, B. U. (2015). Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia tahun 2005-2008), *1*, 116–129.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.

Sari, L. N., Susetyo, D., & Syirod, M. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi : Studi kasus di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006-2015. *Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya*, 14(1), 1–7.

Widayati, W. (2003). Pengelolaan Keuangan Negara, 1–49.

Yoshanda, A. A. (2019). Pendapatan Nasional. *Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.